PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DODY WALUYO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 405504

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 620.487.000**

1. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 223.987.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/224 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
4. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 181.700.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 178.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 9.500.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. 64.870.600**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 261.604.258**

F.	HARTA LAINNYA	Rp.	—
	Sub Total	Rp.	1.138.161.858
III.	HUTANG	Rp.	179.331.013
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	958.830.845

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.